



AXIS Powered by 

GRATIS 6 bulan facebook 200 Menit Nelpon*

Jaringan Lebih Luas, Komunitas Hemat Lebih Besar

Beli dan aktifkan kartu AXIS mu sekarang!
Mukung kami dengan @: 08138 8000 8 081
#AXISjogja | www.axisindonesia.com
*Sesuai pemakaian Rp 1.000,- setiap hari

Sudah Dilelang, Underpass NYIA Mulai Digarap Desember

LIPUTANJOGJA.COM, SLEMAN- Pemerintah memastikan pembangunan *underpass* sepanjang satu kilometer di Kawasan bandara baru Kulonprogo, *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) akan dimulai pada Desember 2018 mendatang. Pekerjaan ini diprediksi baru selesai sekitar 40% di saat NYIA dioperasikan pada April 2019 mendatang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Kretek 2 dan *Underpass* Kentungan Cs. Wilayah DIY Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Muhammad Sidik Hidayat menjelaskan proyek pembangunan terowongan sepanjang satu kilometer di NYIA telah memasuki tahap kontrak pemenang lelang pada pekan lalu.

Ia menargetkan pengerjaan fisik terowongan itu akan dimulai pada akhir November atau awal Desember 2018 mendatang. Ia mengakui, proyek itu belum rampung ketika NYIA beroperasi, sesuai ketentuan lelang pengerjaan dilakukan selama 13 bulan.

13 bulan [target selesai Desember 2019], kalau sampai April 2019 [rencana operasional NYIA] mungkin kami 40 persen pengerjaan. Kalau schedule kami kemungkinan dari bagian tengah [ruas terowongan] dulu yang dikerjakan, tetapi bisa berubah tergantung nanti koordinasi dengan AP I," terang di Kantor PPK Jembatan, Perum Bina Marga, Ringroad Timur, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Jumat (23/11/2018).

Terkait pengerjaan terowongan itu harus melalui koordinasi intens dengan pelaksanaan proyek pengerjaan NYIA. Mengingat, titik proyek yang ia kerjakan berada di bawah area NYIA yang juga sedang dalam pengerjaan dengan pelaksana proyek yang berbeda.

Pihaknya akan menyesuaikan dengan PT Angkasa Pura yang memegang kendali proyek pembangunan NYIA. Posisi satu kilometer terowongan yang akan dikerjakan tepat berada di bawah ruang yang menghubungkan antara

(bersambung ke hal 8 kol 2-5)



Ilustrasi *underpass*

Becak Listrik Harus Mampu Difungsikan Penuh oleh Pengemudinya



Jajaran DPRD Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, beserta Kepolisian saat menerima perwakilan pengemudi betor saat audiensi di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (26/11/2018)

LIPUTANJOGJA.COM, YOGYAKARTA- Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudho menjelaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Perhubungan DIY telah melakukan uji coba becak listrik di Jlagran, minggu lalu.

Ia menegaskan, selain tipe becak yang sesuai dengan identitas Yogya, becak listrik tersebut juga harus mampu difungsikan penuh oleh pengendaranya.

"Harus dilakukan uji tipe dan uji teknis. Apakah kendaraan ini bila dengan orang dan barang yang besar mampu ditangani oleh pengendaranya," bebarnya, saat audiensi dengan pihak pengendar Becak Motor (Betor) di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (26/11/2018).

Yudho menambahkan, bila dari prototipe kemarin yakni dengan daya 350 watt dirasa masih terlalu kecil, maka saat ini pemerintah melalui Bappeda tengah merancang becak listrik dengan daya yang lebih besar yakni 800 watt.

"Kita uji teknis lagi, uji tipe dan bentuk. Kalau sah, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan izinnya. Untuk uji tipe di Jlagran kemarin sedang dikirim ke pusat," bebarnya

Ia menambahkan, Kota Yogyakarta sebagai kota besar sudah saatnya untuk memikirkan alternatif transportasi pengganti betor.

Kendaraan pengganti tersebut harus dipastikan memenuhi kriteria. "Sepanjang Raperda dibahas, kami serahkan semua pada ketentuan dan mekanisme perundangan yang berlaku.

kuat, dari 300 watt menjadi 800 watt.

Saya tidak mau kalau hanya memenuhi tipe tapi keselamatan dan keamanan tidak terjamin," tandasnya.

Kasat Lantas Polresta Kota Yogyakarta, Dwi Prasetyo menjelaskan bahwa selama ini sudah aturan yang dipahami bersama tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL).

KTL tersebut meliputi Jalan Urip Sumoharjo, Tugu, Margoutomo, Malioboro hingga Titik Nol.

"Kita tidak hanya satu kali ini bertemu. Sudah berkali-kali. Sudah diketahui bersama bahwa di KTL ini merupakan daerah yang tidak boleh dilintasi betor," ucapnya.

Sementara itu, Dwi menuturkan betor hingga saat ini masih boleh beroperasi di jalan protokol selama berbagai persyaratan terpenuhi, mulai dari kelengkapan berkendara hingga kelengkapan surat-surat kendaraan.

"Sejauh ini untuk kelengkapan surat-surat, betor kami masukkan sebagai kendaraan bermotor roda dua. Bila ada giat, kami akan periksa STNK dan SIM.

Ketika lengkap, silahkan jalan, namun ketika tidak bisa menunjukkan kelengkapan maka kami tilang," bebarnya.

Ia meminta agar pengendar betor memahami juga terkait fungsi dan tugas pihaknya selaku pengayom masyarakat dari pihak kepolisian.

"Tugas polisi untuk mengedepankan keselamatan. Keberadaan teman-teman (pengemudi betor), kami akomodir.

Tapi yang sudah jadi prioritas, harap bisa disadari bersama-sama," tuturnya.

Siap Amankan Pemilu 2019, Polresta Yogyakarta Gelar Apel Sarpras di Mandala Krida

LIPUTANJOGJA.COM, YOGYA - Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menggelar apel sarana dan prasarana di lapangan kompleks Stadion Mandala Krida, Selasa (27/11/2018) pagi.

Apel ini diselenggarakan untuk kesiapan pengamanan pemilu 2019 di kota Yogyakarta.

Dari pantauan LIPUTANJOGJA.COM, apel diikuti sejumlah pasukan dari jajaran kepolisian, TNI, dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Lengkap dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dari mulai alat angkutan, alat angkutan khusus, kendaraan dinas, sepatu roda, sepeda

kendaraan dinas, sepatu roda, sepeda hingga peralatan senjata.

Di sela-sela apel, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini didampingi oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko dan Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0734 Yogyakarta Mayor (inf) Muhammad Mun-asik, sempat melakukan pengecek semua alat sarana dan prasarana.

Hasilnya semua sarana dan prasarana dalam kondisi siap. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini mengatakan pengamanan pemilu legislatif dan pilpres 2019 di kota

(bersambung ke hal 8 kol 5-2)



Kapolresta Kombes pol Armaini mengecek sarana dan prasarana pasukan di lapangan kompleks stadion Mandala Krida, Selasa (27/11/2018) pagi.



sunsilk
LIVELY CLEAN & FRESH
UNTUK RAHIBUT SGAAR SEPANJANG HARI

MENEMANI WANITA MELANGKAH KE HADAPAN SEJAK TAHUN 2000

Vitamin Citrus Complex

DETIL DAN MANIFESTASI RASO LINTAS BANGSA

OPINI

email : opini@liputanjogja.com



Pengembangan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

OLEH: Anik Ghufron

Pada saat ini, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Beberapa bukti dapat dikemukakan, antara lain; transaksi jual beli barang serba berbasis daring, pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, baik yang bersifat hybrid maupun blended. Layanan perkantoran yang sudah mulai meninggalkan layanan yang berbasis konvensional dan diganti ke layanan berbasis daring. Transportasi dan akomodasi berbasis daring.

Kita tidak bisa melepaskan atau bahkan mengabaikan fenomena-fenomena kehidupan yang terjadi pada saat ini. Fenomena-fenomena kehidupan yang ada justru perlu diantisipasi dan dijawab secara tepat sehingga kita bisa hidup nyaman dan sejahtera. Tantangan bukan dianggap sebagai hambatan justru harus diubah menjadi peluang. Hal ini sejalan dengan pandangan Venti Eka Satya (2018) yang berkata, "dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat. Pada revolusi industri ini terjadi lompatan besar dalam sektor industri, ketika teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mampu mengadopsi Industri 4.0 ini dan mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor."

Mungkin, tidak ada satu institusi di negeri ini yang tidak peduli atau acuh terhadap hiruk pikuk era revolusi industri 4.0. Presiden beserta para menteri kabinetnya telah berupaya keras untuk mengajak semua warga negara bersamasama menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang terhadap fenomena kehidupan era revolusi industri 4.0 ini. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang dan bukan menjadi pecundang di era revolusi industri 4.0 ini. Apa yang perlu dilakukan oleh para stakeholder bidang pendidikan, agar lembaga pendidikan sebagai agen perubahan atau pembaharu masyarakat sesegera terwujud? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan pendidikan sesuai karakteristik kehidupan era revolusi industri 4.0.

Pengembangan Pendidikan

Setidaknya-tidaknya ada lima hal yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan pendidikan yang relevan dengan era revolusi industri 4.0. Pertama, melakukan pergeseran paradigma pendidikan menuju ke paradigma *heutagogic (self determined learning)*. Paradigma ini relevan diterapkan pada era revolusi industri karena menawarkan kebebasan kepada pembelajar dalam belajar. Sejak awal, pembelajar diberikan banyak pilihan tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari, bagaimana membelajari, dan bagaimana membuktikan terhadap tingkatan penguasaan materi yang telah dipelajarinya.

Dalam implementasinya, paradigma *heutagogi* lebih menekankan pada tingkat kemandirian dan kematangan pembelajar dalam belajarnya. Semakin matang pembelajar dalam hal kemandirian belajarnya, maka tingkat ketergantungan pembelajar dari berbagai pihak (guru) dalam belajar harus semakin diminimalkan. Pembelajar dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa-apa yang akan dipelajari dan kapan mereka harus belajar.

Kedua, reorientasi kurikulum pada semua satuan pendidikan. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu memasukkan ke dalam muatan kurikulum keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0, antara lain; berpikir kritis, kreativitas, inovasi, komunikasi, dan kolaborasi. Pengembangan kemampuan literasi digital, big data, dan kemanusiaan. Penggunaan atau aplikasi teknologi informasi dalam pembelajarannya dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat.

Desain kurikulum yang digunakan pada setiap satuan pendidikan harus mengacu dan mendasarkan pada karakteristik masing-masing satuan pendidikan tersebut (akademik, profesional, dan vokasi). Sudah tidak saatnya lagi, kita menggunakan satu desain kurikulum (misalnya desain kurikulum yang mampu menginspirasi sekolah untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan kondisi dan kebutuhannya sesuai kemajuan ilmu, teknologi, dan seni.

Ketiga, perubahan peran pendidik. Di era revolusi industri 4.0, peran pendidik perlu dikuatkan pada peran sebagai agen pembelajaran, kurator, teknolog, kolaborator, ilmuwan, dan peneliti. Perubahan-perubahan peran tersebut sangat relevan diwujudkan mengingat yang dihadapi pendidik dan peserta didik adalah teknologi disrupsi sebagai dampak dari gelombang atau lompatan inovasi yang sangat cepat dan sulit diprediksi sebelumnya.

Interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik lebih bersifat saling menguntungkan, antara pendidik dan peserta didik memperoleh peluang yang sama dalam proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar. Pada saat tertentu pendidik yang menginisiasi dan penyampai materi dan pada saat yang lain peserta didik yang aktif memaparkan materi sebagai hasil kajian atas tugas-tugas belajar yang diberikan oleh pendidik.

Keempat, penguatan kegiatan inovasi dan pengembangan berbagai bidang yang diperlukan era revolusi industri 4.0, antara lain teknologi kecerdasan artifisial, robotik, internet, otomasi kendaraan, bioteknologi, nanoteknologi, teknologi printer tiga dimensi, ilmu-ilmu material, dan komputer kuantum. Selanjutnya, untuk merealisasikannya diperlukan dukungan dana yang memadai dan sumberdaya peneliti yang handal.

Kelima, percepatan internasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap mutu penyelenggaraan dan produk pendidikan di Indonesia. Apabila hal ini terwujud, maka mutu pendidikan kita akan tidak terlampau ketinggalan dengan lembaga pendidikan negara-negara lainnya. Bahkan sebaliknya, antar lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan lembaga-lembaga pendidikan di negara lain bisa saling berkolaborasi untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang dibutuhkan masyarakat era revolusi industri 4.0.

Sampai saat ini, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia telah banyak yang terakreditasi nasional. Sementara itu, yang terakreditasi internasional masih sedikit. Oleh karena itu, program internasionalisasi lembaga pendidikan ini sangat perlu untuk disegerakan perwujudannya.

Tajuk Rencana

Mempertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi bukanlah fenomena baru, melainkan sudah berlangsung lama, bahkan sejak KPK lahir. Karenanya kita tidak kaget ketika KPK me-ungkap data 61,17 persen perkara tindak pidana korupsi yang ditangani berdimensi politik.

Pun kita tidak menutup mata bahwa masih banyak politisi yang tidak men-junjung etika politik se-hingga menempuh segala cara demi mendapatkan keuntungan dan kekuasaan.

Berkaitan itu wajar bila KPK kemudian ingin mengajak 16 parpol yang ikut dalam kontestasi 2019 untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi 2018, yaitu Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) pada 4 Desember 2018 mendatang.

Kita mengapresiasi upa-ya KPK merangkul parpol peserta pemilu untuk bersama-sama memberantas korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Upaya ini sesungguhnya merupakan bagian dari program KPK khususnya di bidang pencegahan, yakni bagaimana agar korupsi tidak merajalela.

Harus diakui, selama ini lembaga antikorupsi ini lebih gencar menjalankan program penindakan, sementara aspek pencegahan masih sangat kurang.

Meski efektivitasnya masih perlu diuji, pelibatan parpol dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam momentum KNPK, merupakan langkah positif yang perlu didukung semua pihak.

Kita juga sepatat perlunya membangun sistem integritas partai politik untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dalam tataran konsep, tentu tak ada masalah, bahkan sangat baik.

Tak ada platform parpol yang tidak mendukung pemberantasan korupsi, semua antikorupsi.

Namun bagaimana dalam tataran implementasi, inilah yang sangat kita prihatinkan. Sebab antara idealisme dengan realita sungguh sangat berbeda.

Kalau kita hendak jujur, mereka (politisi) yang terlibat korupsi, bukan tidak paham tentang etika politik. Ketika bicara soal integritas parpol, mereka juga sangat fasih dan menguasai. Bahkan, terkadang kita terkagum-kagum ketika politisi berbicara soal etika politik, namun tak lama kemudian ia ditangkap KPK karena terjerat korupsi.

Celaknya, kasus serupa terus berulang. Pemahaman para politisi tentang etika politik yang menyangkut moralitas dan perilaku sehari-hari, sebenarnya sudah memadai.

Maka persoalan sejatinya terletak pada pengejawantahan integritas moral pribadi masing-masing.

Tidaklah perlu banyak berdebat soal mana yang masuk kualifikasi korupsi dan mana yang bukan, karena mereka sudah sangat paham. Bahkan merekalah yang merumuskan definisi korupsi untuk kemudian dimasukkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat kondisi tersebut, KPK selain terus melakukan upaya pencegahan, juga perlu meningkatkan kualitas pemindakan agar efektif. Sebab, selama ini terkesan tidak ada efek jera terhadap pelaku korupsi. Untuk mewujudkan hal ini tentu butuh komitmen bersama dari aparat penegak hukum lain seperti hakim.

Selain hukuman badan, kiranya hukuman tambahan berupa pemiskinan terhadap pelaku korupsi relevan untuk diterapkan agar menimbulkan efek jera.



SURAT KEPADA REDAKSI



Anda dipersilahkan untuk mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Liputan Jogja. Surat pembaca atau komentar dikirim ke opini@liputanjogja.com atau ke Redaksi Liputan Jogja, Jalan Babarsari Nomor 12-2, Yogyakarta 55231, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi.

LIPUTAN JOGJA
Selalu yang Terpercaya!

TERBIT SEJAK
29 Agustus 1998

Pemimpin Umum : Cyntia William
Wakil Pemimpin Umum : Anastasia Ersu
Pemimpin Redaksi : Silvia Harefa
Wakil Pemimpin Redaksi : Gracia Tanu
Redaktur Senior : Dianawati Prabowo
Redaktur Pelaksana : Eklesia Ovitamaya
Wakil Redaktur Pelaksana : Emma Nur Ariani
Sekretaris Redaksi : Yara Fitriani